

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai organisasi sektor publik instansi pemerintah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik secara menyeluruh. Pelayanan yang baik akan membuat majunya kinerja-kinerja di pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dalam pemerintahan kinerja sangatlah diutamakan dalam setiap kegiatan didalamnya karena kinerja dapat mempengaruhi tingkat dari pelayanan itu sendiri. Kinerja dapat diartikan sebagai berikut, yang dijelaskan oleh berbagai pihak.

Menurut Indra (2006) dalam Wati (2013) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Revano (2013) dalam Aprilianti (2014) kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi dalam periode tertentu. Dalam suatu kinerja diperlukannya pengambilan keputusan untuk kegiatan didalam terlaksananya pelayanan tersebut.

Dalam pengambilan keputusan, tentunya akan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam instansi pemerintahan. Permasalahan sering terjadi didalam pengambilan keputusan dalam suatu kelompok atau perorangan. Dalam instansi pemerintahan kegiatan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting, karena keputusan akan dapat mempengaruhi jalannya suatu kegiatan didalam pemerintahan tersebut. Banyak pendapat dari masyarakat tentang keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintahan sering berbeda. Sehingga partisipasi dalam pemerintahan sangat penting untuk pelaksanaannya.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak ataupun lebih dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan bagi pembuat keputusan tersebut (Mulyadi, 2001 dalam Wati 2013). Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan partisipasi kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi (Bambang, 2002 dalam Wati, 2013). Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen.

Partisipasi juga dapat dikatakan sebagai partisipasi aktual dimana, partisipasi aktual adalah gejala demokrasi dimana orang berpartisipasi dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan dan juga memikul tanggung jawab sesuai

dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi penyusunan anggaran juga dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja organisasi ataupun pemerintah. Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran. Didalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

Anggaran merupakan komponen utama dalam perencanaan. Munandar dalam kumwaviyah (2010), mengungkapkan pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, dan sebaliknya bagi sektor pemerintah atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik agar orang dapat mengetahui dan juga dapat dikritik dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas.

Dalam instansi pemerintah saat ini sedang dilaksanakannya proyek pembangunan yaitu kereta cepat Light Rail Transit (LRT) yang menggunakan dana multi years contract 2016-2018 dari APBN sebesar Rp11,49 triliun guna untuk konstruksi dan supervisi. Berdasarkan Perpres No 116 tahun 2016 tentang

Percepatan Penyelenggara Kerata Api Ringan (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan ini mesti dipercepat. Ia mengatakan proyek pembangunan LRT ini sudah berjalan 6,04 persen dan pihaknya telah mengeluarkan dana sebesar Rp600 miliar.

Hingga akhir 2016 diperkirakan pembangunan LRT akan mencapai 30 persen dengan alokasi dana sebesar Rp3,5 triliun. Jika sampai akhir 2016 dana belum dikeluarkan, maka pembangunan LRT akan diberhentikan pembangunannya. Sejauh ini Waskita Karya masih memiliki dana untuk melanjutkan pembangunan ini. Kita butuh pinjaman perbankan untuk menjalankan proyek yang menelan dana cukup besar ini, sebab 70 persen pembiayaan berasal dari bank. Pendanaan proyek LRT Palembang tidak termasuk dalam penyertaan modal negara (PMN) yang dikucurkan kepada Waskita Karya senilai Rp3.5 triliun, ini adalah proyek pertama yang menggunakan kontrak khusus dan tidak menggunakan PMN maka digunakan kas equity internal APBN turun sampai 2017 dan 2018.

Sementara itu proyek pembangunan LRT ini terkendala dengan nilai kontrak yang belum keluar dan akan menyebabkan molornya pembangunan LRT di Sumsel. PT. Waskita Karya akan memprediksi bahwa akan menghentikan pengerjaan light rail transit (LRT) jika akhir tahun ini tidak ada kontrak antara kementerian perhubungan (kemhub) dan pihaknya. Pasalnya, kontrak tersebut merupakan sumber pencari pendanaan pembangunan kereta ringan di Palembang. Menurut pemilik Waskita Karya kontrak tersebut sebelumnya harus dilakukan pada januari namun hingga Mei belum terlaksana.

Tidak diketahui pasti apa yang menjadi penyebabnya, namun pihaknya telah mendesak pemerintah untuk melakukan kontrak. (Berita Pagi, 2016)

Menurut Indrianto (1993) dalam Septi (2010) mengatakan bahwa suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternallisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab dan mempunyai komitmen juga pribadi atau sikap untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan anggaran, semakin tinggi tingkat keterlibatan karyawan dalam proses penyusunan anggaran, maka akan semakin meningkatnya kinerja pemerintah. Dimana dalam suatu penyusunan anggaran, adanya komitmen yang telah disepakati bersama antara berbagai pihak, sehingga dapat menciptakan adanya suatu budaya organisasi.

Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang kemudian digunakan untuk mengatasi masalah internal maupun eksternal organisasi. Budaya organisasi yang kuat adalah budaya yang hampir semua manajer menganut bersama seperangkat nilai dan metode menjalankan bisnis yang relatif konsisten (Pabundu, 2006). Dari budaya ini suatu organisasi akan berkomitmen akan terus melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya.

Komitmen organisasi dapat diidentifikasi sebagai suatu keterikatan efektif dan keinginan untuk berbakti kepada sebuah organisasi. Komitmen organisasi dapat diidentifikasi sebagai sebuah tanggapan efektif yang

berasal dari evaluasi terhadap situasi pekerjaan yang menghubungkan seseorang dengan organisasi (Porter dalam Albertus, 2010). Komitmen dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui aparat manajer memihak suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Apabila suatu organisasi memiliki komitmen organisasi yang kuat maka akan mempengaruhi manajer untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Komitmen organisasi juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam peningkatan kinerja. Komitmen organisasi diartikan sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat observasi berkurang, loyalitas karyawan dan lain-lain (Sopiah, 2008:166). Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik, sehingga membuat organisasi itu menjadi berbudaya dan akan terus dilakukan.

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial merupakan penelitian yang masih banyak diperdebatkan. Beberapa penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Misalnya, Kunwaviyah (2010), Solikhun (2012), Djokrda dan Dwiranda (2013), dan Utama (2013) menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja memiliki hubungan yang sangat

positif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kersna Minan (200) yang menemukan hasil tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan oleh Frucot dan Shearon (1991) dan Indriantoro (2000) menemukan pengaruh dimensi budaya terhadap epektifitas partisipasi penyusunan anggaran dalam peningkatan kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikawati (1999) dalam Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) juga menunjukkan bahwa interaksi partisipasi dalam penyusunan anggaran paternalistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial. Penelitian Supomo (1998) dalam Susanti (2002) menunjukkan bahwa interaksi antara anggaran partisipatif dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial.

Sedangkan berkaitan dengan variabel komitmen organisasi, penelitian Randall (1999) dalam Nouri dan Parker (1998) dalam Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) menunjukkan komitmen organisasi sebagai variabel moderating mempengaruhi secara signifikan hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan Wati (2013) berjudul pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah kota Padang. Dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengambil judul yang sama tetapi objek penelitian dan lokasinya berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang telah diterapkan pada organisasi sektor publik dan untuk melihat seberapa besar pengaruh moderating budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran kinerja Instansi Pemerintah kota Palembang maka judul dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran kinerja manajerial?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyusunan anggaran kinerja manajerial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam suatu kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat membuat meningkatnya kinerja manajerial pemerintah yang berada di lingkungan pemerintah kota Palembang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada masyarakat terhadap kinerja manajerial Dinas Pemerintah kota Palembang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai referensi dan juga sebagai tambahan informasi baik untuk mengembangkan atau membuat penelitian yang berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi dan komitmen organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pemerintah kota Palembang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang dari peneliti melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori dari berbagai literatur yang dibutuhkan dalam penelitian. Teori-teori dalam penelitian ini merupakan teori yang berkaitan dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan sampel, mengumpulkan data, mendefinisikan variabel penelitian, dan cara menganalisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara menyeluruh pokok-pokok permasalahan dan menjelaskan hasil analisis dan pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang mungkin bermanfaat bagi instansi pemerintah maupun bagi pihak lain.